



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR : 188.45/78/KEP/425.012/2019  
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas dalam pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun secara manfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);

13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 123);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 163 Tahun 2018 tentang Pedoman Standart Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 163);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Probolinggo.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah Kota Probolinggo
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo dalam satu tahun anggaran.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penyusunan ASB adalah untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyeteraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk :

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas maupun yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

### BAB III

#### KOMPONEN Analisis Standar Belanja

### Pasal 4

Komponen ASB antara lain meliputi :

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap (*Fixed Cost*);
- d. satuan pengendali belanja variabel (*Variable Cost*);
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. batasan alokasi objek belanja.

### Pasal 5

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing kegiatan.
- (2) Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang memicu belanja/biaya menjadi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (3) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan dimana tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan yang merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.
- (4) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan sehingga dalam hal target yang ditetapkan semakin tinggi, maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan.
- (5) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penjumlahan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) dan Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*).
- (6) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu kegiatan.

#### Pasal 6

- (1) Proporsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :
  - a. Rata-rata (*mean*);
  - b. Batas Bawah; dan
  - c. Batas maksimal.
- (2) Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 100% (seratus persen).

#### BAB IV

##### JENIS Analisis Standar Belanja

#### Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
  - a. ASB-001 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada Pegawai;
  - b. ASB-002 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
  - c. ASB-003 Penyuluhan dan sosialisasi kepada Masyarakat;
  - d. ASB-004 Pembinaan dan Pelatihan kepada Masyarakat;
  - e. ASB-005 Survey dan Kajian;
  - f. ASB-006 Pembangunan Gedung/Jalan/Irigasi/Jaringan;
  - g. ASB-007 Rehabilitasi atau Pemeliharaan Gedung/Jalan/Irigasi/Jaringan;
  - h. ASB-008 Pengadaan Peralatan,Sarana,Kendaraan;
  - i. ASB-009 Rapat, Koordinasi, dan Musyawarah;
  - j. ASB-010 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - k. ASB-011 Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan;
  - l. ASB-012 Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan); dan
  - m. ASB-013 Penyusunan Laporan Keuangan.
- (3) Jenis-jenis ASB, perhitungan ASB dan Proporsi objek-objek belanja setiap kegiatan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB V

##### PENERAPAN Analisis Standar Belanja

#### Pasal 8

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kota dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kota Probolinggo.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 16 April 2019  
WALIKOTA PROBOLINGGO  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 16 April 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 78 TAHUN 2019  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
PROBOLINGGO

**JENIS-JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA**

**1. ASB-001 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada Pegawai**

Deskripsi :

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai di OPD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

**Jumlah Orang Hari**

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp106.091.783,57,- per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Jumlah Orang Hari (X1).

$X1 = Rp816.547 \times \text{Jumlah Orang Hari}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp106.091.783,57 + (Rp816.547 x Jumlah Orang Hari)

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	5,06%	0,00%	10,57%
Belanja Bahan/Material	1,20%	0,18%	2,22%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4,53%	0,92%	8,14%
Belanja Jasa Kantor	21,90%	0,00%	46,71%
Belanja Makanan dan Minuman	6,56%	0,13%	12,99%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4,93%	3,36%	6,51%
Belanja Perjalanan Dinas	18,04%	1,98%	34,10%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,72%	0,15%	1,29%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,12%	2,27%	9,97%
Honorarium Non PNS	2,01%	2,01%	2,01%
Honorarium PNS	18,71%	3,28%	34,14%
Uang Lembur	10,22%	0,00%	23,44%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>14%</b>	<b>192%</b>

## 2. ASB-002 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Deskripsi:

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai kepada Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai di OPD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

### Jumlah Orang Hari

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp127.877.351,83 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Jumlah Orang Hari (X1).

$X1 = \text{Rp}398.950,92 \times \text{Jumlah Orang Hari}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp127.877.351,83+(Rp398.950,92 x Jumlah Orang Hari)

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	3,03%	0,31%	5,76%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3,48%	0,00%	7,65%
Belanja Jasa Kantor	11,87%	1,34%	22,39%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	17,81%	0,00%	39,58%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Perlombaan Non PNS	4,01%	4,01%	4,01%
Belanja Makanan dan Minuman	7,30%	1,05%	13,54%
Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,04%	20,04%	20,04%
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,00%	2,00%	2,00%
Belanja Perjalanan Dinas	15,41%	0,43%	30,39%
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	2,14%	2,14%	2,14%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,82%	1,82%	1,82%
Honorarium Non PNS	3,63%	0,86%	6,40%
Honorarium PNS	5,78%	4,03%	7,54%
Uang Lembur	1,68%	1,29%	2,06%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>39%</b>	<b>165%</b>



### 3. ASB-003 Penyuluhan dan sosialisasi kepada Masyarakat

Deskripsi:

Penyuluhan sosialisasi kepada Masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah melalui penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

#### Jumlah Orang Hari

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp57.519.141,36 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Jumlah Orang Hari (X1).

$X1 = \text{Rp}723.889,51 \times \text{Jumlah Orang Hari}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp57.519.141,36 +(Rp185.716,25x Jumlah Orang Hari)

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	5,78%	0,00%	17,32%
Belanja Bahan/Material	4,28%	0,00%	10,32%
Belanja Cetak dan Penggandaan	8,82%	0,00%	17,69%
Belanja Jasa Kantor	5,86%	0,00%	17,87%
Belanja Makanan dan Minuman	9,70%	0,00%	22,48%
Belanja Pakaian Kerja	7,11%	0,00%	14,90%
Belanja Pemeliharaan	4,28%	4,28%	4,28%
Belanja Perjalanan Dinas	6,74%	2,34%	11,14%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,92%	1,36%	2,49%
Honorarium Non PNS	7,45%	0,00%	16,53%
Honorarium PNS	9,41%	0,00%	19,99%
Uang Lembur	28,65%	28,65%	28,65%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>37%</b>	<b>184%</b>

#### 4. ASB-004 Pembinaan dan Pelatihan kepada Masyarakat

Deskripsi:

Pembinaan dan Pelatihan kepada Masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah melalui pembinaan dan pelatihan. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

##### Jumlah Orang Hari

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp73.664.002,33 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Jumlah Orang Hari (X1).

$X1 = \text{Rp}271.345,86 \times \text{Jumlah Orang Hari}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp73.664.002,33 +(Rp271.345,86 xJumlah Orang Hari)

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	3,42%	0,04%	6,81%
Belanja Bahan/Material	5,33%	1,58%	9,07%
Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12,16%	12,16%	12,16%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,71%	0,00%	2,03%
Belanja Jasa Kantor	9,76%	0,00%	21,79%
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,97%	0,97%	0,97%
Belanja Makanan dan Minuman	6,75%	0,00%	14,05%
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2,60%	2,60%	2,60%
Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,59%	7,99%	9,19%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,44%	0,44%	0,44%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18,44%	18,44%	18,44%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4,09%	1,49%	6,70%
Belanja Perjalanan Dinas	11,73%	0,00%	24,25%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,27%	0,79%	3,74%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,35%	1,25%	3,44%
Honorarium Non PNS	4,80%	0,00%	10,32%
Honorarium PNS	4,73%	3,38%	6,08%
Uang Lembur	0,87%	0,27%	1,48%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>51%</b>	<b>154%</b>

## 5. ASB-005 Survey atau Kajian

Deskripsi:

Survey atau kajian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

### Jumlah Dokumen

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp44.613.307,38 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Jumlah Dokumen (X1).

$X1 = \text{Rp}39.703.636,48 \times \text{Jumlah Dokumen}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp44.613.307,38 + (Rp39.703.636,48 x Jumlah Dokumen)

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	1,56%	0,00%	3,81%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2,92%	0,05%	5,78%
Belanja Jasa Kantor	4,92%	0,00%	14,49%
Belanja Jasa Konsultansi	55,49%	22,28%	88,70%
Belanja Makanan dan Minuman	3,84%	0,00%	8,20%
Belanja Pemeliharaan	1,73%	1,73%	1,73%
Belanja Perjalanan Dinas	4,98%	1,49%	8,48%
Honorarium Non PNS	16,69%	16,69%	16,69%
Uang Lembur	7,87%	7,87%	7,87%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>156%</b>

## 6. ASB-006 Pembangunan Gedung/ Jalan/ Irigasi/ Jaringan

Deskripsi:

Pembangunan Gedung/Jalan/Irigasi/Jaringan merupakan kegiatan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk menghadirkan Barang Modal yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

### Nilai Pengadaan

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp32.842.655,60 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Nilai Pengadaan (X1).

$X1 = 0,0011x$  Nilai Pengadaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja modal

= Rp32.842.655,60 + (0,0011 x Nilai Pengadaan) + Belanja Modal

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	9,91%	8,11%	11,72%
Belanja Cetak dan Penggandaan	8,85%	2,66%	15,04%
Belanja Makanan dan Minuman	33,65%	22,26%	45,05%
Belanja Perjalanan Dinas	12,15%	4,00%	20,30%
Honorarium PNS	16,22%	16,22%	16,22%
Uang Lembur	19,22%	9,51%	28,93%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>63%</b>	<b>137%</b>

Catatan:

1. Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa memasukkan belanja modal pembangunan yang bersangkutan, belanja modal ditambahkan ke dalam model ASB diatas.
2. Sehingga total belanja kegiatannya adalah: Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal

## 7. ASB-007 Rehabilitasi atau Pemeliharaan Gedung/ Jalan/ Irigasi/ Jaringan

Deskripsi:

Rehabilitasi atau Pemeliharaan Gedung/ Jalan/ Irigasi/ Jaringan merupakan kegiatan yang dilakukan OPD untuk memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan publik. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

### Nilai Belanja Pemeliharaan

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp51.949.742 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Nilai Belanja Pemeliharaan (X1).

$X1 = 0,0042 \times \text{Nilai Belanja Pemeliharaan}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp51.949.742 + (0,0042 x Nilai Belanja Pemeliharaan) + Belanja Modal

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,29%	0,29%	0,29%
Belanja Makanan dan Minuman	2,27%	2,27%	2,27%
Honorarium Non PNS	4,34%	2,13%	6,55%
Uang Lembur	1,08%	1,08%	1,08%
Belanja Pemeliharaan	92,01%	63,84%	120,19%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>	<b>130%</b>

Catatan:

1. Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa memasukkan belanja modal pembangunan yang bersangkutan, belanja modal ditambahkan ke dalam model ASB diatas.
2. Sehingga total belanja kegiatannya adalah: Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal

## 8. ASB-008 Pengadaan Peralatan/Sarana/Kendaraan

Deskripsi:

Pengadaan Peralatan/Sarana/Kendaraan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh OPD untuk mengadakan peralatan Kantor/Sarana dan Prasarana/Alat Berat/ Kendaraan. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

### Nilai Pengadaan

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp82.953.064,08 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Nilai Pengadaan (X1).

$X1 = 0,037 \times \text{Nilai Pengadaan}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp82.953.064,08 +(0,037 x Nilai Pengadaan)

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	9,93%	0,00%	28,45%
Belanja Barang dan Jasa BLUD	10,94%	7,67%	14,22%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,61%	0,09%	1,13%
Belanja Jasa Kantor	2,53%	0,05%	5,01%
Belanja Jasa Konsultansi	36,60%	0,00%	81,24%
Belanja Makanan dan Minuman	2,70%	0,32%	5,08%
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,57%	0,57%	0,57%
Belanja Pemeliharaan	10,08%	3,86%	16,30%
Belanja Perjalanan Dinas	6,13%	0,00%	12,51%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,28%	1,28%	1,28%
Honorarium Non PNS	11,86%	4,47%	19,26%
Honorarium PNS	5,20%	2,02%	8,38%
Uang Lembur	1,56%	1,37%	1,75%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>22%</b>	<b>195%</b>

Catatan:

1. Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa memasukkan belanja modal pembangunan yang bersangkutan, belanja modal ditambahkan ke dalam model ASB diatas.
2. Sehingga total belanja kegiatannya adalah: Total Belanja Panitia + Jumlah Belanja Modal

## 9. ASB-009 Rapat, Koordinasi, dan Musyawarah

Deskripsi:

Rapat, Koordinasi dan Musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan OPD. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

### Jumlah Orang Hari

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp135.181.743,27 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Jumlah Orang Hari (X1).

$X1 = \text{Rp}62.160,40 \times \text{Jumlah Orang Hari}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp135.181.743,27+(Rp62.160,40 x Jumlah Orang Hari)

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	5,61%	0,00%	13,54%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2,96%	0,00%	8,22%
Belanja Jasa Kantor	13,40%	0,00%	27,92%
Belanja Makanan dan Minuman	8,31%	0,00%	18,43%
Belanja Perjalanan Dinas	36,02%	0,00%	95,03%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,56%	2,96%	4,17%
Honorarium Non PNS	3,25%	2,01%	4,50%
Honorarium PNS	22,71%	9,39%	36,03%
Uang Lembur	4,18%	0,63%	7,73%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>15%</b>	<b>216%</b>



## 10. ASB-010 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Deskripsi:

Penyediaan Surat Menyurat adalah Kegiatan yang dilakukan oleh OPD untuk memenuhi kebutuhan surat menyurat. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

### Jumlah Surat

Satuan pengendali belanja tetap:

= 0 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Jumlah Surat (X1).

$X1 = \text{Rp}38.340,12 \times \text{Jumlah Surat}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

=  $0 + (\text{Rp}38.340,12 \times \text{Jumlah Surat})$

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	15,30%	0,06%	30,53%
Belanja Cetak dan Penggandaan	5,54%	0,37%	10,70%
Honorarium Non PNS	13,14%	6,49%	19,80%
Uang Lembur	66,02%	0,00%	146,22%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>7%</b>	<b>207%</b>

## 11. ASB-011 Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

Deskripsi:

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengamati realisasi rencana pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membandingkan rencana dengan realisasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan merupakan proses memastikan kegiatan yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

### Jumlah Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap:

$$= \text{Rp}1.867.646,83 \text{ per kegiatan}$$

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Jumlah Kegiatan (X1).

$$X1 = \text{Rp}19.083.380,86 \times \text{Jumlah Kegiatan}$$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

$$= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$

$$= \text{Rp}1.867.646,83 + (\text{Rp}19.083.380,86 \times \text{Jumlah Kegiatan})$$

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	3,88%	0,11%	7,65%
Belanja Bahan/Material	8,04%	0,00%	18,01%
Belanja Cetak dan Penggandaan	2,04%	0,00%	4,62%
Belanja Jasa Kantor	6,05%	0,00%	14,61%
Belanja Makanan dan Minuman	10,20%	1,36%	19,04%
Belanja Perjalanan Dinas	15,48%	0,57%	30,38%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,53%	1,13%	9,93%
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	2,16%	0,33%	4,00%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,72%	0,49%	2,95%
Honorarium Non PNS	16,71%	6,76%	26,65%
Honorarium PNS	22,26%	0,00%	45,53%
Uang Lembur	5,92%	2,96%	8,88%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>14%</b>	<b>192%</b>

## 12. ASB-012 Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan)

Deskripsi:

Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan) merupakan kegiatan untuk menyusun bahan kerja dan laporan dari hasil kerja (kinerja) yang ditujukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

### Jumlah Laporan

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp5.612.236,84 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Jumlah Laporan (X1).

$X1 = \text{Rp}1.714.646,76 \times \text{Jumlah Laporan}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp5.612.236,84 +(Rp1.714.646,76 x Jumlah Laporan)

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	10,74%	2,51%	18,96%
Belanja Cetak dan Penggandaan	8,68%	2,73%	14,63%
Belanja Makanan dan Minuman	24,06%	6,86%	41,26%
Uang Lembur	56,53%	27,64%	85,41%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>160%</b>

### 13. ASB-013 Penyusunan Laporan Keuangan

Deskripsi:

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan Semester ataupun tahunan OPD yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku laporan tersebut. Analisis standar belanja atas kegiatan ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Adapun hasil analisis dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Pengendali Belanja:

#### **Jumlah Laporan**

Satuan pengendali belanja tetap:

= Rp5.503.245,89 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

Satuan pengendali belanja variabel dalam model ini adalah 1 variabel independen yang mendasarkan pada Jumlah Laporan (X1).

$X1 = \text{Rp}768.769,20 \times \text{Jumlah Laporan}$

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp5.503.245,89 + (Rp768.769,20 x Jumlah Laporan)

Alokasi Obyek Belanja berdasarkan statistik deskriptif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

<b>OBJEK BELANJA</b>	<b>RATA - RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	8,12%	5,85%	10,38%
Belanja Cetak dan Penggandaan	14,13%	0,98%	27,29%
Belanja Makanan dan Minuman	18,13%	0,00%	40,28%
Uang Lembur	59,62%	41,05%	78,20%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>48%</b>	<b>156%</b>

WALIKOTA PROBOLINGGO  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN